

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu perintah islam yang juga terdapat dalam rukun islam adalah zakat yang didalamnya langsung berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta meminimalisir kecemburuan sosial diantara orang yang mampu dan tidak mampu adalah zakat. Di samping itu, manfaat zakat yang lain adalah wadah atau sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan kesejahteraan dan pertumbuhan di mana seluruhnya merupakan kegiatan muamalah. Al-qur'an sendiri pun telah memerintahkan kita sebagai umat islam untuk berzakat yang tertera pada QS. 2:110 yang artinya "Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." Kemudian juga terdapat pada surah *At-Taubah* ayat 103 yang artinya "Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Pelaksanaan pengelolaan atau pendistribusian dana zakat, syaratnya terfokuskan sesuai syariat Islam dimana pada penyalurannya harus dijalankan secara tepat. Dalam hal ini, Al-Quran Surah *At-Taubah*:60 menjelaskan bahwa terdapat delapan golongan yang mempunyai hak dalam mendapatkan zakat, yakni

diantaranya (1) fakir, yang tidak mempunyai kemampuan memperoleh nafkah. (2) miskin, yang mana tidak mampu bekerja akan tetap kebutuhannya terpenuhi. (3) *Amil*, yang menunjukkan otoritas kaum muslimin dalam menjalankan pekerjaan dalam tiga pengelolaan zakat. (4) *Muallaf*, merupakan seorang yang menganggap dirinya lemah akan iman lantaran baru saja masuk ke dalam Islam. (5) *Riqab* (seorang budak yang telah dibebaskan). (6) *Gharimin* (orang yang memiliki hutang berupa materi kepada orang lain). (7) *Fisabilillah* (orang yang rela berperang di jalan Allah). (8) *Ibnu sabil* (orang yang sedang kesusahan atau terdampar dijalanan). *Ashnaf- ashnaf* ini memiliki hak untuk mendapat bagian zakat sesuai dengan bagian dan ketentuan yang telah ditentukan.

Zakat bisa menghasilkan daya guna atau hasil guna yang maksimal, salah satunya dengan dikelola secara melembaga yang tentunya sesuai dengan syariat islam agar dijalankan dengan efektif dan efisien. Maka dari itu, saat menjalankan pengupayaan tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten /Kota (Badan Amil Zakat Nasional RI, 2011)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu badan resmi yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, *infaq*, dan juga sedekah (ZIS) pada tingkat nasional, dimana badan ini telah diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Kemudian lahir UU No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat secara nasional juga semakin menguatkan peran BAZNAS dalam mengelola zakat. Dalam Undang-Undang tersebut

disebutkan bahwa BAZNAS adalah suatu Lembaga pemerintah yang bersifat nonstruktural dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan begitu, secara langsung BAZNAS khususnya Kota Bandung mempunyai tanggungjawab untuk menjalankan pengelolaan zakat yang berlandaskan pada syariat islam, amanah, kebermanfaatan, adil, kepastian hukum, berintegritas serta akuntabilitas.

Merujuk pada UU RI Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Tertera bahwa pengelolaan atau pendistribusian zakat adalah aktivitas yang di dalamnya terdapat sebuah perencanaan, dan pelaksanaan, serta pengordinasian dalam hal pengumpulan pendayagunaan serta pendistribusian dana zakat. Di mana hal tersebut diatur agar tingkat efektif dan efisien jadi lebih tinggi dalam baik dalam pelayanan maupun pengelolaan zakat agar manfaat dari untuk menyejahterakan masyarakat tercapai sekaligus meminimalisir kemiskinan (Wulan, 2021).

Alasan penulis menjadikan BAZNAS Kota Bandung sebagai tempat penelitian adalah salah satunya adalah karena program Rutilahu yang dilakukan di BAZNAS Kota Bandung mengintegrasikan bentuk program dengan program Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Bandung untuk mengoptimalkan pelaksanaan program khususnya program RUTILAHU ini.

BAZNAS Kota Bandung dibentuk sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi khususnya masyarakat Kota Bandung. Pengelolaan, pengumpulan atau penghimpunan, dan pendistribusian sampai dengan pendayagunaan dana zakat diatur dengan pengaturan internal sehingga lebih transparan dan terkoordinir dengan baik antara pihak Amil maupun dengan pihak

mustahik (penerima manfaat). Selain itu BAZNAS Kota Bandung pun menyelenggarakan beberapa program untuk pendistribusian dana zakat.

Salah satu program dari BAZNAS Kota Bandung yang juga sebagai salah satu program unggulan dari BAZNAS Kota Bandung untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam hal pembedahan rumah. Program tersebut dinamakan program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), oleh karenanya BAZNAS Kota Bandung ini sangat sadar bahwasanya masyarakatnya masih terdapat banyak rumah yang sudah tidak layak huni khususnya di daerah-daerah yang masyarakatnya masih dalam kategori tidak mampu atau miskin. Salah satu penyebabnya adalah karena masih banyak masyarakat Kota Bandung yang tidak memiliki cukup dana untuk sanggup merenovasi rumah miliknya, mereka hanya bisa menggunakan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang terjadi di Indonesia sehingga menjadi prioritas pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun program pembangunan di Indonesia yang dilakukan selama ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan terhadap upaya dalam mengentaskan kemiskinan (Masrofah, 2020). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung tahun 2019-2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Kategori miskin pun tidak hanya dilihat dari segi pendapatan namun juga papan atau termasuk dalam kategori GKNM (Garis Kemiskinan Non-Makanan). Pada tahun 2020 - Maret tahun 2021, jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran

per kapita/bulan naik sebesar 12,48 ribu orang yakni dari 100,02 ribu orang (3,99 persen) menjadi 112,50 ribu orang (4,37 persen). Berdasarkan garis kemiskinan meningkat sebesar Rp 14.944 yakni dari Rp 500.452 menjadi Rp 515.396,-per kapita/bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pun meningkat dari 0,61 menjadi 0,78. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yakni dari angka 0,13 menjadi sebesar 0,24. Kenaikan nilai indeks-indeks tersebut menyatakan bahwasanya rata-rata dari pengeluaran pada penduduk miskin bergerak menjauh dari Garis Kemiskinan (GK) dan adanya suatu ketimpangan pengeluaran pada penduduk miskin di Kota Bandung cenderung melebar.

Gambar 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Bandung Tahun 2019-2020

Kemiskinan di Kota Bandung, 2019-2020		
Poverty in Bandung Municipality, 2019- 2020		
	2019	2020
	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam ribuan)	84.67	100.02
Number of poor people (thousand)		
P0	3.38	3.99
P0		
P1	0.53	0.16
P1		
P2	0.14	0.13
P2		
GK (Rp/Kap/Bln)	474,448	500,452
GK (Rp/Kap/Bln)		

Sumber: Indikator Terkini Provinsi Jawa Barat 2021

Update: 31 Aug 2021

Sumber : BPS Kota Bandung

Gambar 1. 2
Kategori Penduduk Miskin Non-Makanan

The screenshot shows the website of Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. The header includes the BPS logo and name, along with language options (Indonesia | English) and a search bar. The navigation menu includes Beranda, Tentang Kami, Berita, Senarai Rencana Terbit, Publikasi, Berita Resmi Statistik, Layanan, and PPIID. The main content area is divided into two columns. The left column contains a sidebar with filters for Gender, Geografi, Iklim, and three main categories: Ekonomi dan Perdagangan (highlighted in orange), Pertanian dan Pertambangan (highlighted in green), and others. The right column contains the main text, which is titled '1. Penduduk Miskin' and '2. Garis Kemiskinan (GK)'. The text under '1. Penduduk Miskin' explains that BPS uses the 'basic needs approach' to measure poverty, based on the World Bank's 'Handbook on Poverty and Inequality'. It states that poverty is viewed as an inability to meet basic food and non-food needs from an economic perspective. The text under '2. Garis Kemiskinan (GK)' defines the poverty line as the minimum value of rupiah expenditure needed for a person to meet their basic needs for a month. It further breaks down the poverty line into 'Garis Kemiskinan Makanan (GKM)' and 'Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)'. The GKM is defined as the minimum expenditure for basic food needs, based on 2100 kilocalories per capita per day, represented by 52 food commodities. The GKNM is defined as the minimum expenditure for non-food needs such as housing, clothing, education, and health, represented by 51 non-food commodities.

Sumber: BPS Kota Bandung

Oleh karena itu program Rutilahu lahir sebagai salah satu program dalam rangka mengatasi kemiskinan bagian papan. Bantuan Rutilahu adalah salah satu dari bantuan yang masuk ke dalam program Bandung Peduli BAZNAS Kota Bandung, dimana program ini berfokus pada bantuan sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup individu dan lingkungan penerima manfaat agar menjadi lebih baik. Tujuan daripada program ini yakni menjadikan rumah yang semula masuk kedalam kategori rumah tidak layak untuk dihuni menjadi layak untuk dihuni. Didalamnya terdapat pencapaian standar yaitu diantaranya atap, alas, dan dinding. Tujuannya adalah agar memenuhi kebutuhan rumah agar untuk dilayak huni dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pembudayaan pola hidup yang bersih dan sehat.

Namun bantuan program ini tidak semata-mata langsung menurunkan jumlah RTLH khususnya di Kota Bandung. Beberapa data menyatakan masih

banyaknya bangunan yang masuk kategori Tidak Layak Huni ditengah masyarakat baik yang menunjukkan daaerah tertinggi maupun terendah.

Tabel 1. 1
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah RTLH
1.	2019	5.065
2.	2020	6.541
3.	2021	5.985

Sumber : Detikjabar.com

Dilansir dari laman Open Data Kota Bandung, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), jumlah RTLH pada 2020 tercatat mencapai 6.541 rumah. Jumlah ini berkurang sebanyak 969 menjadi 5.572 RTLH yang telah ditangani oleh Pemkot Bandung.

Pada 2021, jumlah RTLH bertambah menjadi 5.985 rumah. Padahal tahun itu, pemkot menangani 920 rumah, menyisakan 5.064 rumah. Dalam data terbuka, ada 7 kecamatan yang mencatatkan jumlah RTLH terbanyak di Kota Bandung. Ketujuh wilayah ini mencatat ada 300-400 rumah tidak layak huni yang masih ditempati warga di Kota Bandung (Open Data, 2022).

Gambar 1. 3
Daftar 7 Kecamatan dengan RTLH Tertinggi Kota Bandung

7 Kecamatan dengan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tertinggi di Kota Bandung

Berdasarkan opendata DPKP Kota Bandung, ada 7 kecamatan dengan jumlah RTLH tertinggi. Ketujuh kecamatan ini mencatat ada 300-400 rumah tak layak huni

Bojongloa Kidul	425
Bandung Kulon	386
Arcamanik	356
Babakan Ciparay	351
Buahbatu	323
Ujungberung	319
Kiaracondong	314

Sumber : Detikjabar.com

Tabel 1. 2
Daftar RTLH Kota Bandung 2021

Sub Wilayah Kota	Kecamatan	Jumlah RTLH di Tahun Berjalan (unit)	Jumlah RTLH Tertangani di Tahun Berjalan (unit)	Jumlah RTLH Terlayani Hingga Tahun Berjalan (unit)
Bojonagara	Andir	266	16	707
Arcamanik	Antapani	92	9	170
Arcamanik	Arcamanik	356	63	381
Tegallega	Astana Anyar	254	38	374
Tegallega	Babakan Ciparay	351	38	850
Kordon	Bandung Kidul	122	1	185
Tegallega	Bandung Kulon	386	26	786
Cibeunying	Bandung Wetan	30	0	69
Karees	Batununggal	237	49	705
Tegallega	Bojongloa Kaler	222	13	747
Tegallega	Bojongloa Kidul	425	49	1035
Kordon	Buah Batu	323	23	302

Cibeunying	Cibeunying Kaler	67	4	206
Cibeunying	Cibeunying Kidul	166	10	433
Arcamanik	Cibiru	264	93	736
Bojonagara	Cicendo	229	0	307
Cibeunying	Cidadap	37	3	186
Arcamanik	Cinambo	110	36	367
Cibeunying	Coblong	194	22	226
Gedebage	Gedebage	250	70	354
Karees	Kiaracandong	314	186	753
Karees	Lengkong	42	1	203
Arcamanik	Mandalajati	148	77	550
Arcamanik	Panyileukan	55	0	169
Gedebage	Rancasari	237	0	449
Karees	Regol	106	7	423
Bojonagara	Sukajadi	255	13	197
Bojonagara	Sukasari	95	1	297
Cibeunying	Sumur Bandung	33	0	235
Arcamanik	Ujungberung	319	72	662

Sumber : Data.Bandung.go.id (Last Update 2022)

Tabel 1.3
Tabel Rekap Bantuan Rutilahu 2020-2022

Tahun	Sub-Program	Target	Jumlah Realisasi Penyaluran	Jumlah Penerima Manfaat
2020	RUTILAHU	Rp 1.000.000.000	Rp. 249,000,000	25
2021	RUTILAHU	Rp 1.050.000.000	Rp. 472,500,000	55
2022	RUTILAHU	Rp 1.050.000.000	RP. 657,500,000	40

Sumber: BAZNAS Kota Bandung

Dari fenomena tersebut peneliti menemukan permasalahan terkait program bedah Rutilahu yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung. Dilihat dari tabel di atas menyatakan bahwa masih naik turunnya dalam jumlah penerima manfaat yang dibantu, kemudian dari segi dana ketidak adanya pencapaian realisasi dari target yang ditentukan.

Hal ini menjadi menarik dibahas karena disamping permasalahan tersebut, kontribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung selama melakukan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Yakni diantaranya BAZNAS Kota Bandung mendapatkan prestasi telah mendapatkan apresiasi penghargaan opini Wajar selama 3 tahun berturut-turut dari kantor akuntan publik Ahmad Raharjo Utama dan mendapatkan penghargaan operasional kelembagaan terbaik pada BAZNAS JABAR AWARD 2021.

Gambar 1.4
Penghargaan Kelembagaan Terbaik BAZNAS Kota Bandung Tahun 2021



Sumber: Web BAZNAS Kota Bandung
Bandung

Gambar 1.5
Penghargaan Wajar Tanpa Opini Tahun 2021



Sumber: Instagram BAZNAS Kota

Apresiasi dan prestasi BAZNAS Kota Bandung ternyata masih menyisakan angka rumah tidak layak huni yang masih tinggi di wilayah Kota Bandung dan ketidaktercapaian target dana yang telah ditentukan serta penurunan jumlah penerima bantuan Rutilahu. Hal inilah yang menjadi bahan informasi dan gambaran bagi penulis sekaligus menjadi salah satu alasan yang menggugah penulis untuk mengkaji lebih dalam program bedah rumah tidak layak huni yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dengan cara mengevaluasi program. Dengan demikian, dilakukannya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program bedah rumah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandung dalam hal meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. ditambah lagi kajian pada BAZNAS Kota Bandung terutama fokus pada evaluasi program bedah rumah belum ada yang melakukannya, sedangkan seperti yang diketahui bersama, evaluasi penting dilakukan guna memaksimalkan dan juga mengukur keberhasilan dari suatu program karena evaluasi merupakan salah satu komponen yang ada dalam manajemen program.

Hal diatas dapat dicermati dari apa yang dikemukakan oleh Samuel Batlajery dalam terdapat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian (evaluasi). Tertulis bahwa terdapat salah satu komponen penting yaitu evaluasi. Komponen evaluasi ini diperlukan salah satunya guna penyempurnaan dari suatu program. Dengan dilakukannya evaluasi dapat diketahui kesesuaian tujuan program dengan hasil kesesuaian rencana dengan implementasi, dan juga sebagai bahan informasi dalam hal pengambilan keputusan selanjutnya apakah program perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan.

Berlandaskan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan dari data-data diatas, akhirnya penulis tertarik mengangkat masalah tersebut dan ingin membuat penelitian dengan mengangkat judul "**Evaluasi Program Bedah Rutilahu Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung**".

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, peneliti telah mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan, yakni diantaranya:

1. Tingkat kemiskinan penduduk Kota Bandung yang masih meningkat hingga 2021 dimana kategori miskin termasuk didalamnya dalam hal papan/rumah.
2. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Kota Bandung masih banyak bahkan meningkat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu terkait Evaluasi Program Pada Program Bedah Rutilahu Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung. Untuk memudahkan penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya:

1. Bagaimana evaluasi context program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung?
2. Bagaimana evaluasi input program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung?
3. Bagaimana evaluasi proses program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung?
4. Bagaimana evaluasi produk program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berlandas pada rumusan masalah diatas, untuk itu tujuan penelitian yang akan dicapai diantaranya:

1. Mengetahui evaluasi context program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung
2. Mengetahui evaluasi input program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung
3. Mengetahui evaluasi proses program Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung
4. Mengetahui evaluasi produk Rutilahu di BAZNAS Kota Bandung

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan kajian kepustakaan dalam penelitian pada evaluasi program bantuan khususnya dalam pelaksanaan program bantuan bedah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni).

2. Kegunaan Praktis

a. Penulis

Memenuhi syarat kelulusan dan dapat menyelesaikan dalam program studi Sarjana Administrasi Publik (S. AP)

b. Instansi

Penelitian ini dapat sebagai digunakan bahan masukan dan informasi bagi BAZNAS Kota Bandung untuk pengambilan keputusan dan penyempurnaan program bedah rumah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yakni suatu model yang berkonseptual dimana didalamnya berisi hubungan teori satu dengan yang lainnya untuk digunakan dalam penelitian disuatu permasalahan. Kerangka berpikir yakni keterkaitan antar variable yang disusun dari beberapa teori yang dideskripsikan (Santoso, 2021).

Menurut L.F.Keller (2003) dalam Keban (2014) melihat dewasa ini administrasi publik dianggap sebagai manajemen yakni *a system of management for complex public administration*. Dalam definisi ini administrasi publik dipandang sebagai manajemen pengembangan teknologi modern menuju *modern governance* dan dipengaruhi oleh gerakan reformasi administrasi publik yang dikenal dengan nama *New Public Management* (NPM) (Keban, 2014).

Adapun menurut Keban (2014), dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur maka administrasi publik harus dilihat setidaknya-tidaknya dari enam dimensi strategis, sebagai berikut:

1. Dimensi Kebijakan
2. Dimensi Struktur Organisasi
3. Dimensi Manajemen
4. Dimensi Etika
5. Dimensi Lingkungan
6. Dimensi Akuntabilitas Kinerja

Dalam buku Mulyono berjudul Pengantar Manajemen, Samuel Batlajery menyatakan fungsi manajemen dalam mengemban tugas, yakni diantaranya (Mulyono, 2021):

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
5. Penilaian (evaluasi)

Selain itu, dikemukakan oleh Judit A. Lewis dan kawan-kawan dalam buku *Management of Human Service Program* terdapat beberapa komponen dalam manajemen program pelayanan manusia guna memaksimalkan program yaitu *Planning. Designing. Developing Supervising, Managing Finances, Monitoring dan Evaluating.*

Secara umum, evaluasi adalah penyelidikan sistematis terhadap nilai beberapa objek. Secara operasional, evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang nilai beberapa objek — misalnya, kualitas, nilai, kejujuran, ekuitas, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, atau signifikansinya (Stufflebeam, Daniel L. Zhang, 2017). Menurut Daresh “*Evaluation is simply the process of determining the worth-goodness or badness of something*” yang berarti penilaian adalah suatu proses penetapan sesuatu apakah baik atau buruk.

Teori yang digunakan penulis untuk penelitian terkait evaluasi yaitu menggunakan Model Evaluasi CIPP adalah salah satu pendekatan evaluasi yang

paling banyak digunakan dan terbukti benar. Pada dasarnya, Model CIPP memberikan arahan untuk menilai Context, Input, Process, dan Product suatu program. Tidak seperti banyak pendekatan evaluasi lainnya, Model CIPP tidak hanya menilai hasil perusahaan tetapi juga lingkungan, sasaran, rencana, sumber daya, dan implementasinya. Orientasinya proaktif dalam membimbing kebutuhan sebagai penilaian, penetapan tujuan, perencanaan, pelaksanaan, dan penjaminan mutu, dengan penekanan pada perbaikan berkelanjutan. Ini juga retrospektif dalam melihat kembali, menyimpulkan, dan menilai akuntabilitas dan nilai dari program yang diselesaikan atau usaha lain (Stufflebeam, Daniel L. Zhang, 2017). Ini tidak hanya memandu spesialis evaluasi untuk melaksanakan evaluasi secara efektif, tetapi juga memberikan keterlibatan yang berarti dari pemangku kepentingan program selama proses evaluasi.

Pada dasarnya, Model CIPP adalah pendekatan terorganisir untuk memenuhi standar profesi evaluasi seperti yang didefinisikan oleh Komite Bersama Standar Evaluasi Pendidikan (1981, 1994, 2011). Ini dapat disesuaikan untuk aplikasi oleh berbagai pengguna, termasuk evaluator, spesialis program, peneliti, pengembang, kelompok kebijakan, administrator, komite atau kelompok tugas, dan juga orang awam. Model ini menyediakan berbagai peserta evaluasi dengan kerangka kerja dan bahasa umum yang dapat mereka gunakan untuk memfasilitasi upaya kolaboratif mereka untuk mengamankan dan menggunakan hasil evaluasi yang baik.

Evaluasi konteks menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang, serta kondisi dan dinamika kontekstual yang relevan. Menurut Model CIPP, mereka yang

melaksanakan program harus memperoleh (atau melakukan) dan menggunakan evaluasi konteks untuk menentukan tujuan dan prioritas program, dan untuk memastikan tujuan ditargetkan untuk mengatasi kebutuhan dan masalah yang signifikan dan dinilai.

Evaluator menyediakan pembuat keputusan program dengan laporan evaluasi konteks selama perencanaan program untuk menginformasikan proses penetapan tujuan dan untuk membantu staf program memperhitungkan dinamika lingkungan yang relevan. Sepanjang evaluasi, evaluator memperbarui informasi evaluasi konteks yang sesuai. Pada akhir evaluasi, evaluator memberikan informasi evaluasi konteks terbaru kepada klien untuk membantu mereka dan konstituen mereka menilai tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya dan terutama untuk menginterpretasikan signifikansi hasil program dengan mempertimbangkan kebutuhan penilaian penerima manfaat yang ditargetkan dan keadaan di lingkungan program.

Evaluasi input menilai strategi program, rencana aksi, pengaturan staf, dan anggaran untuk kelayakan dan efektivitas biaya potensial untuk memenuhi kebutuhan yang ditargetkan dan mencapai tujuan. Evaluasi input mungkin bersifat komparatif, seperti dalam mengidentifikasi dan menilai cara-cara pilihan untuk mencapai tujuan, atau nonkomparatif, seperti dalam menilai satu rencana dan komponen-komponennya. Menurut Model CIPP, mereka yang merencanakan program dapat memperoleh keuntungan.mendapatkan dan menggunakan temuan evaluasi input untuk membantu merencanakan program mereka, menulis proposal pendanaan yang menang, mengalokasikan sumber daya, menugaskan staf,

menjadwalkan pekerjaan, dan pada akhirnya membantu orang lain menilai rencana dan anggaran program.

Evaluasi input membantu perencanaan program dengan mengidentifikasi dan menilai strategi program alternatif, rencana pengelolaan dan anggaran, ukuran kinerja program yang memungkinkan, dan penyedia layanan alternatif. Dalam melakukan dan melaporkan evaluasi masukan, evaluator memberikan informasi untuk mendukung proses perencanaan klien. Perhatian utama dari evaluasi masukan adalah untuk membantu para pembuat keputusan merencanakan dan menganggarkan tentang cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan yang dinilai dan ditargetkan dari penerima manfaat yang dituju.

Pembuat keputusan sering menggunakan masukan laporan evaluasi untuk mengidentifikasi dan membandingkan manfaat relatif dari pendekatan program yang relevan dan ada yang telah diterapkan di tempat lain dan/atau untuk merangsang staf untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan inovatif, terutama ketika pendekatan yang ada dinilai tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan program yang dinilai penerima manfaat yang ditargetkan dan untuk mencapai tujuan program. Menjelang akhir proses perencanaan awal klien, evaluator menyelesaikan pekerjaan evaluasi input dengan memeriksa dan menilai rencana aktivitas spesifik klien, jadwal, rencana kepegawaian, dan anggaran.

Seringkali, klien menganggap suksesi konteks dan masukan laporan evaluasi berguna dalam menulis proposal pendanaan program. Selain itu, klien mungkin menemukan catatan konteks yang diperoleh dan temuan evaluasi input berguna untuk tujuan akuntabilitas jika dan ketika kritik mengajukan pertanyaan

tentang mengapa program itu dibuat, dimulai, ditargetkan, direncanakan, dan dianggarkan sebagaimana adanya.

Evaluasi proses memantau, mendokumentasikan, menilai, dan melaporkan implementasi rencana. Evaluasi semacam itu memberikan umpan balik selama pelaksanaan program dan kemudian melaporkan sejauh mana program tersebut dilaksanakan sebagaimana dimaksud dan dibutuhkan. Evaluasi proses membantu staf menjaga agar kegiatan tetap berjalan secara efisien dan efektif, mencatat kemajuan mereka, mengidentifikasi masalah implementasi, menyesuaikan rencana dan kinerja mereka untuk memastikan kualitas program dan pengiriman layanan tepat waktu, dan mendokumentasikan proses aktual tersebut. Kemudian, klien dapat menemukan catatan temuan evaluasi proses dan bagaimana temuan tersebut ditujukan agar berguna dalam membantu kelompok pengguna yang luas untuk memahami dan menilai implementasi dan pengeluaran program dan juga menentukan mengapa hasilnya menjadi seperti yang mereka lakukan. Secara khusus, staf program, pengawas, dan konstituen dapat memeriksa dokumentasi implementasi untuk menilai apakah hasil program yang mungkin kurang disebabkan oleh strategi yang lemah atau implementasi strategi yang tidak memadai.

Evaluasi produk mengidentifikasi dan menilai biaya dan hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan, jangka pendek dan jangka panjang. Evaluasi ini memberikan umpan balik selama implementasi program sejauh mana tujuan program ditangani dan dicapai. Evaluasi produk yang sedang berjalan membantu mereka yang bertanggung jawab atas implementasi program untuk menjaga agar

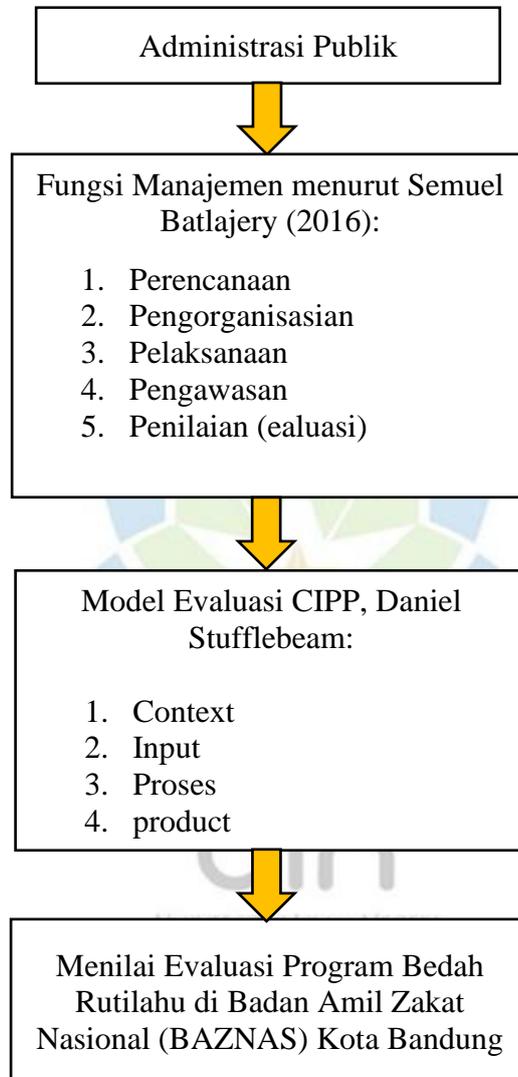
program tetap fokus pada pencapaian hasil penting dengan biaya yang masuk akal dan untuk mempertahankan catatan pencapaian penting maupun kekurangan. Pada akhir program, evaluasi produk mengidentifikasi dan menilai berbagai hasil program, baik yang diantisipasi maupun yang tidak diantisipasi, positif maupun negatif. Pada akhirnya, produk retrospektif evaluasi membantu klien dan kelompok pengguna yang lebih luas untuk mengukur keefektifan biaya upaya dalam mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan target penerima manfaat, dan, dalam banyak kasus, menghasilkan manfaat yang tidak terduga dan terkadang menghasilkan hasil yang buruk. Pertanyaan kunci yang dibahas adalah: Apakah program mencapai tujuannya?, Apakah program tersebut berhasil mengatasi kebutuhan dan masalah yang ditargetkan?, Apa hasil yang tidak terduga, baik positif maupun negatif?, Apakah hasil program sepadan dengan biayanya?.

Dalam meringkas evaluasi jangka panjang, komponen evaluasi produk (Apakah berhasil?) dapat dibagi lagi menjadi empat sub bagian penilaian: menjangkau masyarakat atau kelompok penerima manfaat yang ditargetkan; efektivitas; keberlanjutan; dan kemampuan transportasi. Subbagian evaluasi produk ini bertanya, Apakah penerima manfaat yang tepat tercapai? Apakah kebutuhan dan masalah yang ditargetkan ditangani secara efektif? Apakah pencapaian program dan mekanisme untuk memproduksinya berkelanjutan dan terjangkau dalam jangka panjang? Apakah strategi dan prosedur yang menghasilkan pencapaian terbukti atau setidaknya menunjukkan janji untuk dibawa, disesuaikan, dan terjangkau untuk penggunaan yang efektif di tempat lain?

Tujuan evaluasi produk yang paling penting adalah untuk membantu staf program menggunakan temuan evaluasi produk sementara untuk mempertahankan fokus pada pencapaian hasil yang penting dan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam kemajuan program menuju pencapaian hasil yang sukses. Pada akhirnya, mereka yang bertanggung jawab atas program disarankan untuk menggunakan evaluasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan hasil program secara sumatif: positif dan negatif, diantisipasi dan tidak diantisipasi. Menurut Model CIPP, tujuan utama lain dari evaluasi produk adalah untuk membantu manajer program, pengawas, penyandang dana, dan konstituen mendapatkan dan menggunakan bukti yang cukup dan tepat untuk menilai apakah pencapaian program signifikan dan layak untuk dilakukan.

Tujuan dari adanya kerangka pemikiran ini adalah agar penulis dan pembaca bisa dengan mudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian terkait evaluasi program pada program Bedah Rutilahu (Rumah tidak layak huni) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung menggunakan teori model evaluasi CIPP. Maka untuk mempermudah penelitian ini, dibuatlah kerangka pemikiran dalam bentuk bagan seperti dibawah ini:

Gambar 1. 6
Kerangka Pemikiran



G. Proposisi

Dalam proses pelaksanaan program Rutilau ini dapat ditinjau kembali evaluasi context, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk berjalan dengan baik dengan adanya teori evaluasi CIPP. Penelitian ini mengacu pada teori Stufflebean dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang nantinya akan menghasilkan manfaat bagi BAZNAS Kota Bandung.

